

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

**Sekretariat Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

KATA PENGANTAR

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Setditjen PKTL) merupakan unit organisasi yang memegang peran koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PKTL. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PKTL Tahun 2019, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Setditjen PKTL Tahun 2019 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 60.702.776.268,- atau 97,98% dari total pagu anggaran Tahun 2019.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Setditjen PKTL serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2020
Sekretaris Ditjen PKTL,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1.3. Sumber Daya Manusia	3
1.4. Sarana dan Prasarana.....	5
1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019	7
2.2. Rencana Kerja Tahun 2019.....	8
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran.....	8
2.4. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.1.1. Metode Pengukuran	11
3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	12
3.2. Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	55
BAB V PENUTUP	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Setditjen PKTL</i>	<i>3</i>
<i>Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL</i>	<i>7</i>
<i>Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2019.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabel 8. Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2019.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 10. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2019</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2019.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 13. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Ditjen PKTL.....</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 14. Rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2019.....</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 15. Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2019</i>	<i>53</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koordinasi merupakan sebuah proses sinergi agar tindakan yang akan dilaksanakan setiap pihak dalam satu organisasi tidak saling bertentangan dan simpang siur, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Aspek penting inilah yang menjadi perang Setditjen PKTL, disamping memberikan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, disusunlah Laporan Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2019.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen PKTL mengemban tugas **melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen**. Sebagai salah satu Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PKTL, dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen PKTL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Ditjen

Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

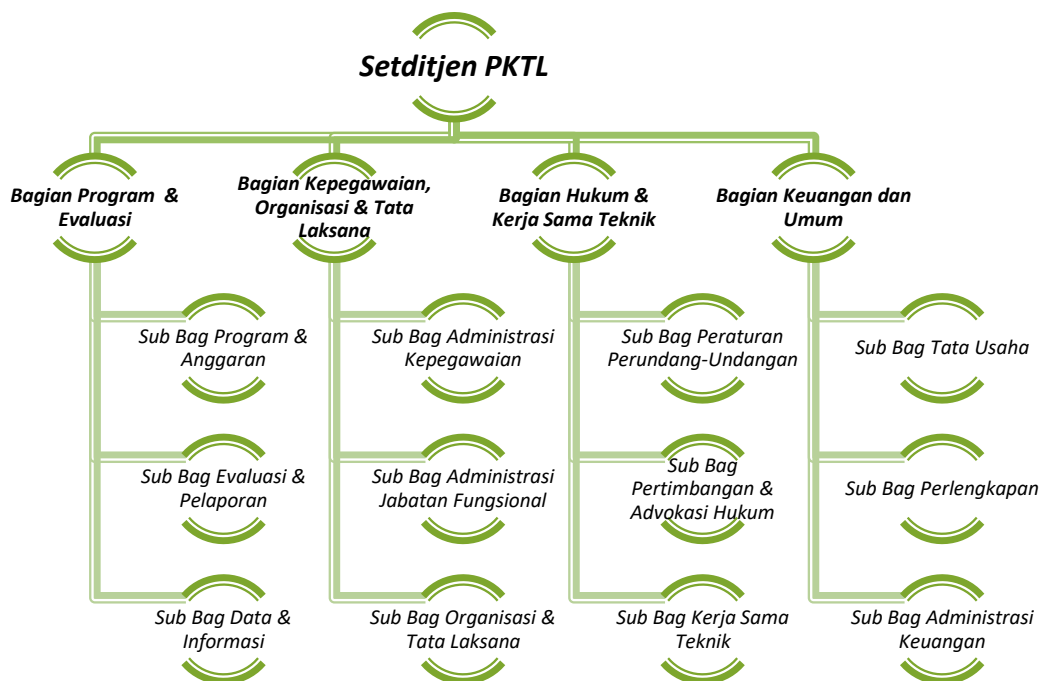
Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows

Setditjen PKTL terdiri dari 4 (empat) Bagian/Jabatan Administrator/Unit Eselon III dan 12 (dua belas) Sub Bagian/Jabatan Pengawas/Unit Eselon IV dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PKTL



Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Setditjen PKTL

Bagian Program dan Evaluasi	Tugas	Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.
	Fungsi	Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Ditjen. Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Tugas	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan
	Fungsi	Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan
Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	Tugas	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri
	Fungsi	Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri
Bagian Keuangan dan Umum	Tugas	melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan
	Fungsi	Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Pelaksanaan urusan perlengkapan

Sumber: PermenLHK Nomor: P. 18 /MenLHK-II/2015

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setditjen PKTL sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebanyak sebanyak 71 orang yang terdiri dari 39 laki-laki (54,92%) dan 32 perempuan (45,08%). Pegawai Setditjen PKTL tersebut tersebar pada empat bagian. Di antara jumlah tersebut, terdapat 1 pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar/Karya Siswa dan 1 pegawai diperbantukan ke unit organisasi lain. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Eselon III	IV			III			II			I			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
Sekretaris Ditjen PKTL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Bagian Program & Evaluasi	3	1	4	9	5	14	0	0	0	0	0	0	12	6	18
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	0	1	1	7	7	14	0	1	1	0	0	0	7	9	16
Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	1	0	1	5	6	11	0	0	0	0	0	0	6	6	12
Bagian Keuangan dan Umum	1	2	3	8	9	17	3	0	3	1	0	1	13	11	24
JUMLAH	6	4	10	27	24	51	3	1	4	1	0	1	39	32	71

Sumber: SIMPEG

Dalam menjalankan roda organisasi, Setditjen PKTL dibantu 24 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar di seluruh bagian. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 71 orang, jumlah keseluruhan pegawai Setditjen PKTL sebanyak 95 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Eselon III	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekretaris Ditjen PKTL	PNS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Bagian Program & Evaluasi	PNS	0	0	6	1	3	4	0	1	3	0	0	0	0	0	12	6
	PPNPN	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	PNS	0	0	1	2	6	5	0	1	0	1	0	0	0	0	7	9
	PPNPN	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0
Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	PNS	0	0	1	1	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0	6	6
	PPNPN	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bagian Keuangan dan Umum	PNS	0	0	2	2	2	7	2	1	5	1	1	0	1	0	13	11
	PPNPN	0	0	0	0	6	2	1	0	6	0	0	0	1	0	14	2
Jumlah per Status Pegawai	PNS	0	0	11	5	15	20	2	4	9	2	1	0	1	0	39	32
	PPNPN	0	0	0	0	9	5	1	0	8	0	0	0	1	0	19	5
TOTAL	PNS / PPNPN	0	0	11	5	24	25	3	4	17	2	1	0	2	0	58	37

L = Laki-laki P = Perempuan

Sumber: SIMPEG

1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Setditjen PKTL untuk mendukung pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2019 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp 94.644.292.929,- dengan rincian pada Tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
117111	Barang Konsumsi	42.204.000	0	42.204.000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
131111	Tanah	67.502.736.000	0	67.502.736.000
132111	Peralatan dan Mesin	10.564.796.977	8.022.343.033	2.542.453.944
133111	Gedung dan Bangunan	22.432.662.000	1.375.929.641	21.056.732.359
134113	Jaringan	0	0	0
135111	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset tetap lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
162151	Software	258.873.500	122.190.438	136.683.062
162161	Lisensi	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	53.400.000	0	53.400.000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	2.539.891.376	1.724.740.995	815.150.381
JUMLAH		107.054.024.256	103.444.113.853	11.276.172.857

Sumber: Laporan BMN per 31 Desember 2019

Jenis dan kondisi sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah sebagai berikut (penyajian data pada tingkat kelompok barang):

Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi Baik	Kondisi Rusak (Berat/Ringan)	Jumlah Seluruhnya	Keterangan
1	Tanah	4.010 m ²	-	4.010 m ²	
2	Gedung Bangunan	4	0	4	1 unit bangunan yang berada di Dramaga, Bogor dihentikan penggunaannya dan direncanakan untuk dihibahkan.
3	Kendaraan Roda 4	26 unit	4 unit Rusak Berat	30 unit	3 unit mobil rusak berat telah terjual dan telah terbit risalah lelang dari KPKNL Bogor, namun belum terbit SK. Penghapusan. Sedangkan 1 unit mobil rusak berat sudah dihentikan penggunaannya namun

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi Baik	Kondisi Rusak (Berat/Ringan)	Jumlah Seluruhnya	Keterangan
					belum diajukan permohonan penghapusannya karena belum terbit SK. PSP (Penetapan Status Penggunaan)
4	Kendaraan Roda 2	12 unit	3 unit Rusak Berat	15 unit	3 unit kendaraan roda dua rusak berat telah terjual dan telah terbit risalah lelang dari KPKNL Bogor, namun belum terbit SK. Penghapusan
5	Peralatan & Mesin	1.025 unit	1.324 unit Rusak Berat	2.349 unit	Sebanyak 1.132 unit peralatan dan mesin kondisinya rusak berat telah terjual dan telah terbit risalah lelang dari KPKNL Bogor, namun belum terbit SK. Penghapusan. Sedangkan sebanyak 193 unit rusak berat merupakan hasil inventarisir yang baru dilakukan juga telah dihentikan penggunaannya.

Sumber: Laporan BMN per 31 Desember 2019

1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PKTL, pada tahun 2019 ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya dukungan data dan informasi secara cepat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
2. Perbedaan pemahaman dalam menterjemahkan pedoman formasi Jabatan Fungsional dalam menyusun Analisis Beban Kerja lingkup Ditjen PKTL.
3. Dukungan SDM dari beberapa operator SIMPEG untuk melakukan updating data SIMPEG belum dilakukan secara regular dan akurat.
4. Terbatasnya kuota untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan maupun uji kompetensi bagi pejabat fungsional menghambat proses kenaikan jabatan dan pangkat para pejabat fungsional.
5. Terdapatnya perbedaan penerapan aturan pencantuman gelar maupun penyesuaian ijazah bagi pejabat fungsional tertentu antara KLHK dengan BKN mengakibatkan proses pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah pejabat fungsional terhambat.
6. Perbedaan Persepsi Dalam Penilaian DUPAK, serta jumlah pejabat fungsional yang semakin banyak belum sebanding dengan SDM yang ada, baik dari segi tim penilai maupun SDM Sekretariat Tim Penilai.
7. Terbatasnya SDM yang ada untuk menangani suatu permasalahan hukum dari BPKH.
8. Terbatasnya anggaran dari BPKH untuk kegiatan persidangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019

Tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015 – 2019 yaitu “Memastikan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional”. Dalam mencapai sasaran Ditjen PKTL (Ditjen PKTL) secara keseluruhan, Setditjen PKTL mempunyai peran dalam mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan, melalui dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi/satuan kerja terutama melalui Intervensi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Regulasi/Kebijakan dan Kemitraan/ Kerjasama.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Ditjen PKTL telah ditetapkan kegiatan Setditjen PKTL yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 % (A) di tahun 2019.

Penetapan kinerja tersebut bertujuan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek perencanaan program, kelembagaan, SDM, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama pada Ditjen PKTL. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan ke depan.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal: SAKIP Dengan Nilai Minimal 78,00 (A) Di Tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 Point)

Sumber: Renstra Setditjen PKTL Tahun 2015-2019

2.2. Rencana Kerja Tahun 2019

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, terdapat standarisasi output generik untuk eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan pada Tahun 2019 adalah **meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019**. Penyesuaian terkait output generik dilakukan dengan mengubah nomenklatur unit kegiatan pada rencana kerja tahun 2019.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, sasaran kegiatan Setditjen PKTL dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) unit kegiatan sebagai berikut:

Gambar 2. Unit Kegiatan tahun 2019



Sumber: Renja Setditjen PKTL Tahun 2019

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Alokasi anggaran Setditjen PKTL pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp 68.404.161.000,- yang seluruhnya bersumber dana Rupiah Murni. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran No S.772/AG/2019 tanggal 7 Mei 2019, pagu Setditjen

PKTL berubah menjadi Rp 67.662.556.000,-. Pagu anggaran ini kembali mengalami perubahan di Bulan Juni menjadi Rp 59.489.788.000,- dan kembali bertambah pada Bulan September menjadi Rp 60.489.788.000,-. Perubahan ini terjadi pada alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Pada Bulan Oktober kembali dilakukan revisi DIPA antar satker dan pagu anggaran Setditjen PKTL bertambah menjadi Rp 62.475.039.000,-. Pagu ini kembali berubah pada Bulan November menjadi Rp 61.951.150.000,-.

Rincian perubahan anggaran per jenis belanja antara pagu awal dan pagu terakhir disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	53,195,013,000	-6.472.768.000	46.722.245.000
Belanja Barang	14,830,574,000	-249.743.000	14.580.831.000
Belanja Modal	378,574,000	+269.500.000	648.074.000
Jumlah	68.404.161.000	-6.453.011.000	61.951.150.000

Sumber: DIPA Setditjen PKTL Tahun 2019

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Setditjen PKTL sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja satker. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Setditjen PKTL adalah "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019". Indikator kinerja sasaran tersebut adalah 1) Nilai SAKIP A (78 point) di Tahun 2019, 2) Layanan internal (*overhead*) sebanyak satu layanan dan 3) Layanan perkantoran (1 layanan). Penjabaran dari perjanjian kinerja tersebut seperti tercantum pada Tabel 8 (Turunan Perjanjian Kinerja Terlampir).

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen Rencana Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Dokumen
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan Pemantauan, Monev dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Dokumen
Pengelolaan Data dan Informasi	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Terselenggaranya Kehumasan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4 Dokumen
Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
Pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan	3 Dokumen
Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Laporan Pelayanan dan Perlengkapan	2 Dokumen
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan

Sumber: Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P.9/SETDIT/PROEV/KEU.1/8/2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Metode Pengukuran

3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun

sebelumnya dengan menggunakan rumus:

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja pada Setditjen PKTL menunjukkan bahwa capaian kinerja Setditjen PKTL Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Setditjen PKTL Tahun 2019 adalah sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen Rencana Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan Pemantauan, Monev dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Pengelolaan Data dan Informasi	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Terselenggaranya Kehumasan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5 Draft	5 Draft	100%
Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Laporan Pelayanan dan Perlengkapan	3 Judul	3 Judul	100%
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%

3.1.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun 2019 suatu output dengan persentase capaian kinerja di tahun 2018. Efektivitas capaian kinerja tahun 2019 disajikan pada Tabel 10. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Tabel 10. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2019	Efektifitas Capaian Kinerja
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen Rencana Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	100%	1
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan Pemantauan, Monev dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	100%	1
Pengelolaan Data dan Informasi	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Terselenggaranya Kehumasan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	100%	1
Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	1
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	100%	100%	1
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	100%	1
Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	100%	1
Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	100%	1
Pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan	100%	100%	1
Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Laporan Pelayanan dan Perlengkapan	100%	100%	1
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100%	100%	1
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	100%	100%	1

3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Seluruh

sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,03.

Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Fisik Tahun 2019	% Capaian Keu. Tahun 2019	Efisiensi Capaian Kinerja
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen Rencana Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	98,49%	1,02
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan Pemantauan, Monev dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	98,32%	1,02
Pengelolaan Data dan Informasi	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Terselenggaranya Kehumasan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	96,61%	1,04
Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	100%	96,22%	1,04
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	100%	96,45%	1,04
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	98,18%	1,02
Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	97,71%	1,02
Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100%	98,23%	1,02
Pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan	100%	98,69%	1,01
Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Laporan Pelayanan dan Perlengkapan	100%	96,47%	1,04
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100%	95,68%	1,05
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	100%	98,16%	1,02

3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 5 Tahun	Satuan	Realisasi Per Tahun					Total Realisasi	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2015	2016	2017	2018	2019		
Dokumen Rencana Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	22	Judul	5	4	4	5	6	24	109,09
Laporan Pemantauan, Monev dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	29	Judul	6	6	6	6	6	30	103,44
Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Terselenggaranya Kehumasan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	15	Judul	3	3	3	3	4	16	106,67
Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5	Judul	1	1	1	1	1	5	100,00
Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	5	Judul	1	1	1	1	1	5	100,00
Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	5	Judul	1	1	1	1	1	5	100,00
Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	23	Draft	6	2	5	5	5	23	100,00
Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	13	Judul	2	2	1	1	1	7	53,85
Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	17	Judul	2	3	2	2	2	11	64,71

Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	15	Judul	3	6	3	3	2	17	113,33
Laporan Penyusunan TL-LHP	5	Laporan	1	1	1	1	1	5	100,00
Laporan SIMAK-BMN	15	Judul	3	3	2	3	2	13	86,66
Dokumen sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	5	Laporan	1	1	1	1	1	5	100,00
Rata-rata Capaian Renstra									95,21

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Lingkup Setditjen PKTL telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan. Namun terdapat dua indikator kinerja dengan tingkat capaian yang relatif masih rendah, yaitu Penyusunan Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Penyusunan Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerja sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Permasalahan keduanya sama, yaitu karena terdapat komponen kegiatan yang pada awalnya direncanakan di dalam Renstra, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Dalam struktur anggaran Tahun 2019, dijalankan kebijakan standarisasi nama komponen kegiatan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan target Renstra berupa penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Laporan Penyusunan TL-LHP tergabung dalam indikator kinerja Laporan Keuangan. Hal ini juga terjadi pada target Renstra berupa penyusunan laporan SIMAK BMN dan penyelenggaraan sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan. Pelaksanaan kedua target ini tergabung dalam indikator kinerja Pelayanan Umum dan Perlengkapan.

3.1.2.5. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*

Capaian Kinerja Setditjen PKTL berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan” adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan minimal 78,00 di tahun 2019.

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan, Setditjen PKTL melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan 12 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, antara lain:

Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan belanja negara sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Sinergi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan kebutuhan mutlak dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kementerian Keuangan memandang pengelolaan APBN secara umum masih belum efektif, efisien, optimal dan produktif. Di tengah kondisi umum seperti ini, sistem perencanaan dan penganggaran yang dibangun Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus diupayakan menuju perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya. Perbaikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek fokus pada prioritas, transparansi dalam alokasi pendanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif.

Penyusunan dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 meliputi 5 kegiatan utama yang merupakan satu kesatuan proses yang saling terkait dan akan menentukan arah kebijakan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depannya, yaitu: Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019; Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020; Penyusunan Standar Kegiatan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020; Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2020 (RKA-K/L); Penyusunan Rancangan Renstra Ditjen PKTL 2020-2024; serta Konsolidasi dan Koordinasi Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran.

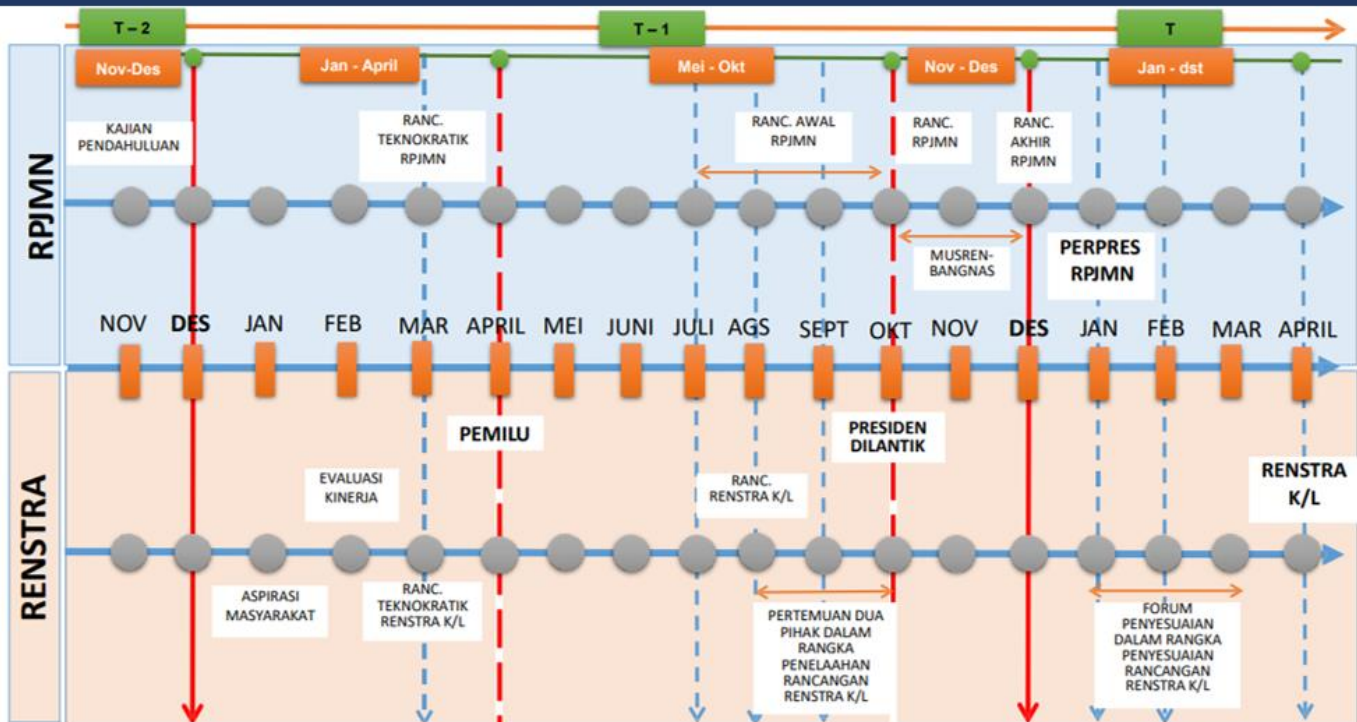
Hasil (outcome) penting atas tercapainya seluruh output sasaran kinerja ini adalah rencana kegiatan dan anggaran yang tersusun menjadi acuan bagi seluruh satker pusat dan UPT dalam penyusunan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2019 dapat direalisasikan 100%.

Penyusunan dokumen rencana di tahun 2019 dimulai dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019. Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/PKTL/SETDIT/KEU.1/1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2019. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang disusun pada tahun 2019 berisi sasaran yang telah teranggarkan dalam dokumen RKA-K/L yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara berjenjang, satker lingkup Ditjen PKTL juga menyusun Perjanjian Kinerja. Pada lingkup satker Setditjen PKTL Perjanjian Kinerja telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P. 9/SETDIT/PROEV/KEU.1/8/2019 tentang Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2019.

Tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal dan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 pada tanggal 3 Desember 2019 dengan mempedomani Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024, Rancangan Renstra KLHK Tahun 2020-2024 serta mengacu pada RKTN Tahun 2011-2030. Rancangan Renstra Ditjen dan Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akan dicermati dan disempurnakan, bersinergi dengan Penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Penyusunan Renstra KLHK Tahun 2020-2024.

TIME LINE PENYUSUNAN RENSTRA



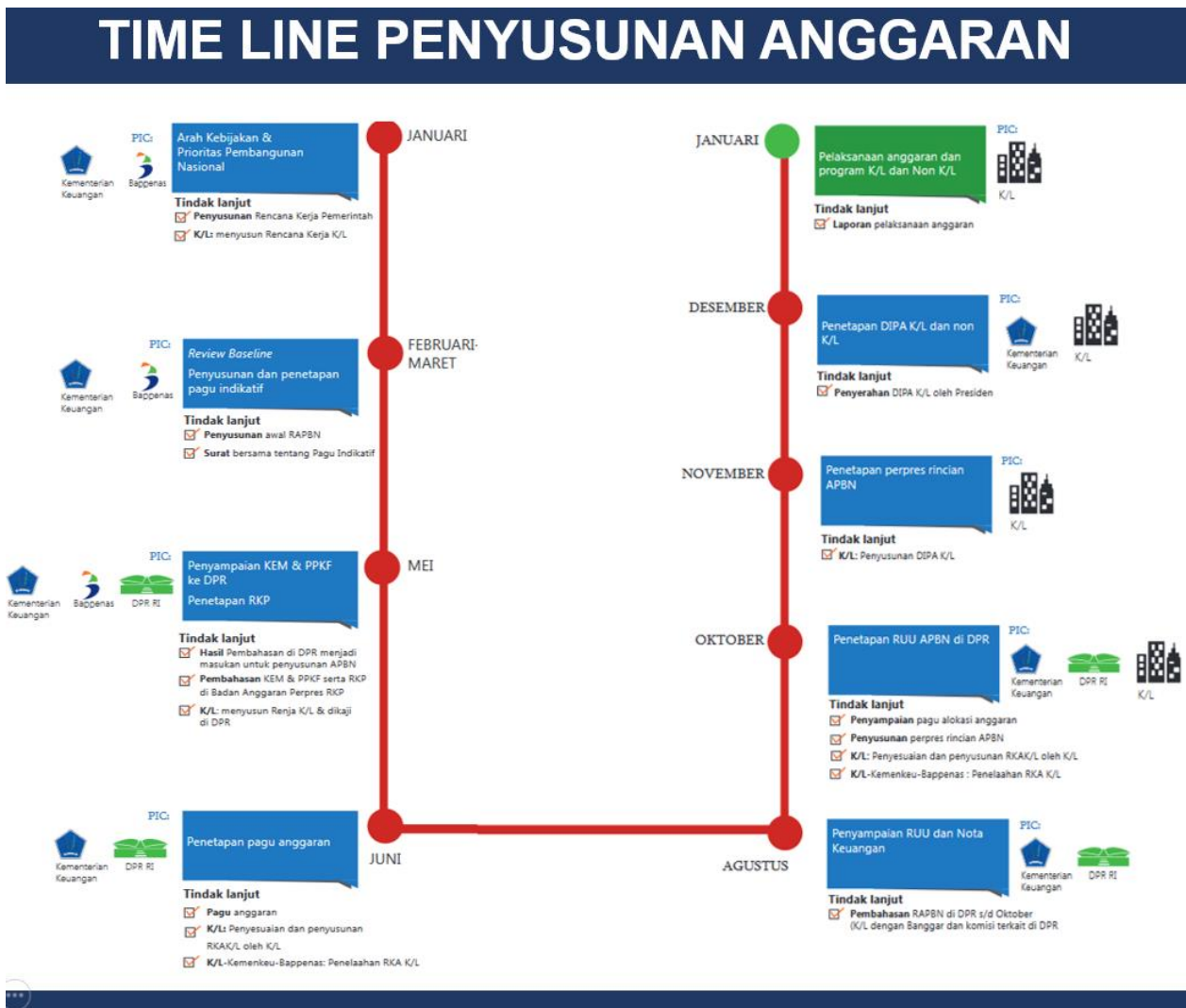
Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019. Renja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan bagi satker di bawahnya dalam penyusunan perencanaan kegiatan, diantaranya oleh satker Setditjen PKTL yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P.20/SETDIT/PROEV/KUM.1/12/2019 tentang Rencana Kerja Setditjen PKTL Tahun 2020.

Sebagai dokumen pendukung penyusunan program dan kebijakan anggaran, telah ditetapkan Dokumen Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2020 melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/12/2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020.

Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen PKTL Tahun 2020 tersebut ini merupakan acuan bagi seluruh satker lingkup Ditjen PKTL baik pusat maupun daerah (UPT) dalam penyusunan RKA-K/L pada tahapan berikutnya.

Proses Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada lingkup Ditjen PKTL Tahun 2020 dilaksanakan secara bersama instansi terkait, baik internal Kementerian LHK (Itjen dan Biro Perencanaan) dan eksternal dengan KemenPPN/Bappenas dan DJA Kemenkeu. Dalam lingkup Ditjen PKTL, dilakukan pematangan perencanaan kegiatan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang melibatkan seluruh satuan kerja baik pusat maupun daerah (UPT).

Gambar 3. Time Line Penyusunan Anggaran



Hasil akhir dari Proses Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada lingkup Ditjen PKTL Tahun 2020 adalah diterbitkannya Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-029.06.1.465013/2020, tanggal 12 November 2019.

Beberapa kondisi yang ada menunjang pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana dan Anggaran adalah dipergunakannya aplikasi KRISNA dalam penyusunan kegiatan mulai aktif sejak tahun 2017 serta penelaahan online melalui aplikasi satu DJA yang meningkatkan efisiensi dan kualitas monitoring serta konsistensi dan keseragaman data.

Keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dengan tercapainya seluruh output fisik berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan SDM lingkup setditjen PKTL serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, dukungan dengan mitra kerja dalam bentuk koordinasi, konsultasi yang terjalin dengan KemenPPN/Bappenas dan DJA Kemenkeu sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penggunaan anggaran khususnya dalam pelaksanaan revisi.

Tantangan yang dihadapi berupa perubahan arah kebijakan pada pertengahan periode tahun Renstra yang belum dilengkapi dengan payung hukum yang kuat mengakibatkan terkendalanya eksekusi pelaksanaan kegiatan. Kendala juga masih ditemui terkait kebutuhan data dan informasi yang akan sangat menentukan target dan standar pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Tantangan lain dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran serta proses revisi anggaran khususnya yang berkaitan dengan prioritas nasional adalah belum optimalnya koordinasi antar unit kerja lingkup Ditjen PKTL. Hal ini sangat berkaitan dengan penyelenggaraan program PKTL yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Upaya yang dapat dilakukan ke depannya antara lain peningkatan eksistensi organisasi PKTL, antara lain SDM dan regulasi dalam mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan serta koordinasi antar unit kerja di lingkup Ditjen PKTL. Selain itu optimalisasi penerapan Teknologi Informasi yang kontinyu dalam memperkuat sistem data dan informasi sebagai dasar perencanaan program dan anggaran.

Kegiatan penyusunan Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2019 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyusunan *Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan* sebesar Rp 1.859.754.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.831.653.963,- (98,49%).

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen. Monitoring merupakan suatu aktifitas pengawasan dan pengendalian yang berfungsi untuk memastikan proses pelaksanaan suatu kegiatan/program telah sesuai dengan yang direncanakan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan suatu aktifitas untuk menilai tingkat kinerja yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Tingkat kinerja diukur dengan pendekatan indikator kinerja seperti *input*, *output*, *outcome* untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan

menunjukkan tingkat capaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan.

Penyajian laporan yang baik memegang peran penting dalam berputarnya roda organisasi. Penyajian laporan dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana akan berjalan maksimal apabila didukung dengan laporan yang berkualitas, sehingga proses yang berjalan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program. Kondisi tersebut merupakan **outcomes utama** atas sasaran kinerja kegiatan ini.

Di dalam pelaksanaannya, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Untuk dapat menghasilkan laporan tingkat Eselon I yang baik, peran seluruh satker dalam menyuplai data pendukung memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas pelaporan terus diupayakan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PKTL Nomor : P. 8/PKTL/SETDIT/KEU.5/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Lingkup Ditjen PKTL. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterbitkannya peraturan ini adalah terwujudnya sistem pelaporan yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan yang akurat, lengkap, jelas, tepat waktu dan *legitimate*, sehingga relevan dan memadai untuk digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi dan bahan masukan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran serta Penyajian Kinerja Bidang PKTL Tahun 2019 terdiri dari 6 kegiatan pokok antara lain: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran; Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTL; Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PKTL; Evaluasi Rencana Kerja (Renja); Monitoring Pelaksanaan Renaksi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh kegiatan ini telah **terrealisasi 100%** pada Tahun 2019.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pelaksanaan RKA-K/L atau DIPA agar sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Selain itu, dilakukan juga rapat bulanan yang bersifat rutin untuk membahas berbagai langkah tindak lanjut atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas fungsi. Monitoring atas perkembangan kegiatan yang berjalan juga dipantau secara *on line* oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran) dan BAPPENAS. Setiap satker melakukan pembaruan data atas progres pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi.

Pada tahun 2019 telah disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Ditjen PKTL dan tingkat satker (Setditjen PKTL). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj Ditjen PKTL adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta

pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK atas LKj Ditjen PKTL dan LKj Setditjen PKTL, tidak ada rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan pada kedua dokumen tersebut.

Evaluasi Renja merupakan penjabaran pelaksanaan seluruh rencana yang telah tercantum dalam Renja dan membandingkannya dengan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen DIPA. Dokumen ini disusun untuk mengevaluasi tingkat kesinkronan antara Renja dengan pengimplementasiannya di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Selain itu, evaluasi ini dilakukan sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan Renja periode berikutnya.

Terdapat empat Rencana Aksi yang dipantau pada tahun 2019, yaitu Rencana Aksi HAM, Rencana Aksi Bela Negara, Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres No 9 tahun 2017 tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK Tahun 2019-2020. Berdasarkan laporan yang telah dihimpun, target Rencana Aksi yang dapat tercapai antara lain: 1) Terlaksananya evaluasi terhadap hasil diseminasi terkait pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; 2) Terlaksananya penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA di Provinsi Papua Barat sepanjang 637,48 Km dan Papua sepanjang 350,16 Km; 3) Terbitnya SK Penetapan KH tahap pertama seluas 103.423,21 Ha (Sumatera); 4) Terbitnya Berita Acara Integrasi IGT penunjukan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan; 5) Tersusunnya konsep revisi Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 Jo P.62/Menhut-II/2013 tentang pengukuhan kawasan hutan; dan tersusunnya data base kumulatif hasil penetapan kawasan hutan seluas 88.248.477,82 Ha.

Gambar 4. Rencana Aksi Tahun 2019



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dalam mengawal penerapannya di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap Satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke Satker UPT yang diawali dengan penelaahan dokumen penyelenggaraan SPIP yang tersedia, disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (pelaporan). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap ketertiban penyampaian Desain Penyelenggaraan SPIP, Laporan Triwulan, serta Laporan Tahunan dari Satker Pusat maupun Satker UPT lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2019, sebagian besar satker lingkup Ditjen PKTL telah menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penilaian maturitas SPIP Tahun 2018 oleh BPKP dengan nilai 3,12 (terdefinisi). Nilai ini menempatkan Ditjen PKTL pada peringkat ketiga dengan nilai tertinggi di tingkat KLHK, di bawah Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi. Penilaian maturitas SPIP kembali dilakukan oleh BPKP pada tahun 2019, namun hingga Laporan Kinerja ini disusun belum terbit hasil penilaiannya. Upaya perbaikan dalam implementasi SPIP terus diupayakan. Tantangan utama pelaksanaannya adalah mentransformasikan anggapan bahwa SPIP merupakan kewajiban menjadi suatu kebutuhan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan **Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi** Bidang PKTL Tahun 2019 sebesar Rp 810.185.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 796.556.826,- (98,32%). Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan pada pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi dengan optimalisasi pemanfaatan ruang rapat kantor dalam setiap rapat pembahasan yang diselenggarakan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Pemantauan dan Evaluasi Bidang PKTL merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2019 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 6 dokumen setiap tahunnya. Dukungan seluruh satker Lingkup Ditjen PKTL merupakan unsur penunjang utama tercapainya sasaran kinerja ini. Ketaatan dalam penyampaian laporan dan berbagai kebutuhan data terkait proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjaga kualitas dan validitas data sangat menentukan kualitas hasil evaluasi yang diperoleh. Hasil evaluasi inilah yang menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan yang relevan sehingga proses yang berjalan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

Sebagai langkah untuk perbaikan ke depannya, pada Tahun 2019 telah selesai dibangun Sistem Monitoring dan Pelaporan Ditjen PKTL yang berbasis online. Sistem ini akan mulai diterapkan pada awal Tahun 2020 dan diharapkan proses pelaporan

Ditjen PKTL dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat dan akuntabel secara cepat.

Pengelolaan Data dan Informasi

Penyusunan data dan informasi, statistik, dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan Tahun 2019 meliputi 7 kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan; Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri; Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018, Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019, serta Pengelolaan Website Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Outcomes utama kegiatan ini adalah terpublikasikannya kebijakan dan hasil-hasil kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 melalui media cetak (buku, Buletin, leaflet, poster) dan elektronik (website) serta pameran sebagai bahan referensi bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.

Kegiatan kehumasan menjadi bagian penting dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat atau stakeholder baik di pusat maupun daerah terkait kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PKTL. Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dilaksanakan diantaranya meliputi keikutsertaan pada kegiatan pameran; pembuatan leaflet, *motion grafis/ explainer grafis*, stiker, dan poster; dan koordinasi dengan unit kerja di pusat maupun di daerah dalam rangka peliputan kegiatan dan pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI.

Partisipasi Ditjen PKTL dalam 9 (sembilan) agenda pameran antara lain: Pameran dalam rangka Hari Hutan Internasional Tahun 2019, pada tanggal 21 Maret 2019 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta; Indogreen Environment & Forestry Expo 2019, pada tanggal 4-7 April 2019 di Makassar; Indonesia Green Growth 7 Sustainability Expo 2019, pada tanggal 26-28 Juni 2019 di Malang; Pameran Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 pada tanggal 11-13 Juli 2019 di JCC Senayan, Jakarta; Pameran Festival Penegakan Hukum (Gakkum) Tahun 2019 pada tanggal 23-25 Juli 2019, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta; Pameran Konservasi Alam dalam rangka Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pada tanggal 6-9 Agustus 2019 di Taman Wisata Alam Muka Kuning, Batam; Pameran Gelar Kebangsaan pada tanggal 29-30 Agustus 2019 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta; Pameran Sinergi Aksi Informasi & Komunikasi (SAIK) Tahun 2019 pada tanggal 23-25 Oktober 2019 di Bangka Belitung; serta Pameran dalam rangka Diseminasi Program & Kegiatan Keplanologian Kehutanan dan Tata Lingkungan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada tanggal 19-23 November 2019.



Gambar 5. Pameran Diseminasi Program & Kegiatan Keplanologian Kehutanan dan Tata Lingkungan, pada tanggal 19-23 November 2019 di Bumi Perkemahan Cibubur



Gambar 6. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI

Kegiatan Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan kegiatan lanjutan yang dimulai sejak Tahun 2005. Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi kebutuhan media penyaluran informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan serta pengembangan kompetensi pengetahuan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan yang sangat terkait dengan dinamika pembangunan. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan perencanaan melalui media buletin yang sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas, serta sebagai wadah pengembangan profesi fungsional dan staf di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Selama Tahun 2019, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Planolog.

Pada kurun waktu Januari s/d Desember 2019, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Menteri LHK dengan Komisi

IV DPR RI dengan materi menyangkut tugas dan fungsi Ditjen PKTL sebanyak 2 (dua) kali, dengan Komisi VII DPR RI sebanyak 5 (lima) kali, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Komisi IV DPR RI sebanyak 3 (tiga) kali, serta dengan Komisi VII DPR RI sebanyak 4 (empat) kali.

Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan media penyebarluasan informasi mengenai Teknologi Informasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan media penyaluran kompetensi pengetahuan teknologi informasi serta wacana pengembangannya. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan penyusunan buletin teknologi informasi planologi kehutanan dan tata lingkungan adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan teknologi informasi tenaga fungsional dan staf di lingkup Ditjen PKTL dan sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan teknologi informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas. Ditjen PKTL telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan pada Tahun 2019.

Penyusunan Buku Statistik Bidang PKTL Tahun 2018 merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi yang diperoleh dari Unit Eselon II Lingkup Ditjen PKTL serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan yang disajikan secara berkala setiap tahun.

Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen PKTL Tahun 2019 adalah salah satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dimaksudkan untuk memenuhi informasi terkait kegiatan dan pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan yang akurat dan mutakhir pada tahun berjalan, dalam rangka pelayanan data dan informasi. Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah diterbitkan pada bulan Desember 2019.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh proses penyusunan Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan PKTL Tahun 2019 sebesar Rp 2.132.767.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.060.496.710 (96,52%),-. Kegiatan ini merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Penganggaran pada Tahun Anggaran 2019 lebih besar dibandingkan pada Tahun Anggaran 2018, karena terdapat tambahan anggaran pada penyelenggaraan kegiatan kehumasan dalam rangka penyerahan hasil TORA dan Pertikawan. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2019 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 3 dokumen setiap tahunnya.

Pengelolaan Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan proses pencapaian tujuan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk mewujudkan pegawai yang mampu bekerja secara profesional dan kreatif dalam memperbaharui metode dalam mencapai tujuan. Dengan jumlah SDM yang mencukupi dan memiliki kualifikasi yang diperlukan akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL secara ber-dayaguna dan ber-hasilguna serta untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme pegawai Ditjen PKTL pusat dan daerah di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian/ kepengurusan umum.

Untuk mendukung sasaran strategis "**Pengelolaan Kepegawaian**", pada Tahun 2019 telah dilaksanakan 7 (lima) kegiatan yaitu: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan Aparatur, Bimbingan Teknis Penyempurnaan Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional, dan Pengelolaan Pengembangan Pegawai.



Gambar 7. Bimbingan Teknis Implementasi SIMPEG dan SAPK Lingkup Ditjen PKTL

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Administrasi kepegawaian mencakup proses manajemen PNS, mutasi, promosi, disiplin pegawai, kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, kenaikan gaji berkala, dan kesejahteraan pegawai. Dari proses tersebut diperoleh hasil antara lain: terwujudnya *bezzeting* pegawai setiap tahun; terwujudnya DUK (Daftar Usul Kepangkatan) tiap tahun; pengusulan pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dalam rangka pemenuhan karier dan

kesejahteraan pegawai tiap periode; pengusulan formasi pegawai; dan terbarukannya data SIMPEG. Keseluruhan proses ini akan berdampak pada layanan kepegawaian

Pembinaan pegawai dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019 yang dihadiri oleh seluruh pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk lebih memperkuat komitmen dan tekad, guna lebih meningkatkan jiwa korsa jajaran Ditjen PKTL dalam mendukung kinerja dalam rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pembinaan merupakan upaya preventif untuk mengurangi tindak tidak produktif pegawai dan sifat indisiplin pegawai. Pembinaan secara berkelanjutan akan berdampak positif terhadap kinerja pegawai dan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, selain itu untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk motivasi kerja.

Selain itu, terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Lingkup Ditjen PKTL pada tanggal 6 Maret 2019 yang dihadiri oleh 100 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan baru dan menyatukan persepsi dalam hal pengambilan kebijakan terkait administrasi kepegawaian. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemutakhiran data SIMPEG pada Pusat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk meningkatkan akurasi, relevansi dan aktualisasi data dan informasi kepegawaian dalam rangka pembinaan, pengelolaan dan pelayanan bidang kepegawaian secara efisien dan efektif. Updating simpeg sangat dibutuhkan untuk dukungan kondisi SDM terhadap program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penataan administrasi jabatan fungsional dilakukan dengan bimbingan teknis penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi pejabat fungsional tertentu dan rapat penilaian DUPAK untuk proses penerbitan Penetapan Angka Kredit. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbitnya Penetapan Angka Kredit setiap periode penilaian dan tertibnya pengusulan dan penilaian DUPAK setiap periode penilaian dan sebagai rekomendasi bagi pejabat fungsional untuk diangkat dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat



Gambar 8. Pembinaan Aparatur Lingkup Ditjen PKTL

Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional dilaksanakan 17 Juli sd 18 Juli 2019, di Ruang Rimbawan II, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta dihadiri oleh 80 orang peserta pusat dan BPKH terdiri dari wakil pejabat fungsional lingkup Pusat dan BPKH, Tim Penilai Fungsional, serta staf Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Adapun topik yang dibahas dalam Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional adalah bagaimana Posisi Strategis Pejabat fungsional dalam memperkuat profesionalisme organisasi, pengelolaan administrasi jabatan fungsional, kenaikan pangkat dan jabatan, uji kompetensi, penyesuaian ijazah, ABK dan formasi jabatan fungsional dengan Narasumber dari Biro Kepegawaian dan Organisasi. Dalam Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional tersebut terdapat sesi pengenalan Sistem Penyusunan Hasil Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional berbasis WEB, dan Validasi Uji Petik Butir Kegiatan Pejabat Fungsional PEH, serta Persamaan Persepsi Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional.

Pengelolaan Pengembangan Pegawai dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan lain. Pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memperoleh ijin Tugas Belajar berjumlah 3 (tiga) orang. Sedangkan jumlah pegawai yang memperoleh ijin belajar berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari pegawai Pusat 4 (empat) orang dan Pegawai BPKH 33 (tiga puluh tiga) orang. Pegawai yang mengikuti ujian dinas Tahun 2019 berjumlah 8 (delapan) orang dan yang mengikuti ujian PI PG berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Pada Tahun 2019 terhadap Pegawai yang telah selesai Tugas Belajar S2 dilaksanakan presentasi Karyasiswa di Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Pusat berjumlah 8 orang dengan pelaksanaan 2 kali tahapan.

Gambar 9. Presentasi Karyasiswa



Dalam rangka pengembangan pegawai telah dilaksanakan Tes 4 Kriteria lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan jumlah Peserta 66 (enam puluh enam) orang terdiri dari Pusat 27 (dua puluh tujuh) orang dan BPKH 39 (tiga puluh sembilan) orang. Dari 66 orang peserta yang tidak lulus berjumlah 1 (satu) orang. Tes 4 Kriteria merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai apabila akan melanjutkan pendidikan dengan beasiswa baik oleh KLHK maupun beasiswa sponsor diluar KLHK.

Gambar 10. Pelaksanaan Tes Empat Kriteria



Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2019 sebesar Rp 1.163.786.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.125.157.505,- (96,68%). Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan, belanja perjalanan biasa dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2019 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 2 dokumen setiap tahunnya.

Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain itu, SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor P.65/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka pada tingkat unit Eselon I perlu juga ditetapkan peraturan yang mengatur proses bisnis pada unit tersebut. Pada tahun 2018, Direktur Jenderal PKTL telah menetapkan Peraturan Ditjen PKTL nomor P.3/PKTL/Setdit.OTL.2/3/2018 tentang Proses Bisnis Ditjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdaarkan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, proses bisnis dijabarkan ke dalam prosedur kerja (SOP), maka Prosedur Kerja lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah disusun dan disahkan melalui Peraturan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.8/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perlu dicermati dan disempurnakan. Pada tahun 2019 kegiatan penyempurnaan prosedur kerja lingkup Ditjen PKTL diarahkan pada kegiatan sinkronisasi antara Prosedur Kerja dan Proses Bisnis lingkup Ditjen PKTL. Output dari kegiatan ini adalah dokumen prosedur kerja hasil sonkronisasi antara antara Prosedur Kerja dan Proses Bisnis lingkup Ditjen PKTL.

Melalui penyempurnaan prosedur kerja diharapkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, dapat ditemukan penyebabnya dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan telah memiliki dan dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Output yang dihasilkan pada Tahun 2019 berupa Dokumen Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen PKTL (Pusat) dan draft Prosedur Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang akan didampingi penyempurnaannya pada tahun 2019.

Pada Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja. Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta stempel/cap instansi. Statement ini bermakna bahwa penyusunan prosedur kerja lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan menjadi tanggung jawab BPKH, sedangkan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana hanya mempunyai kewenangan dalam hal koordinasi, fasilitasi dan asistensi agar prosedur kerja yang dihasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing-masing BPKH.

Selain penyempurnaan prosedur kerja, sebuah organisasi juga memerlukan analisa jabatan dan perhitungan analisa beban kerja yang cermat agar tercipta organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Perhitungan analisis Beban Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK. 415/MENLHK/SETJEN/OTL.2/9/2018 tentang Hasil Analisis Beban Kerja lingkup KLHK. Namun, karena konsep ABK dimaksud telah disusun sejak tahun 2017 dan terjadi dinamika kepegawaian dan kebutuhan pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akibat pensiun, alih tugas dan penambahan beban kerja, maka Ditjen PKTL kembali menyusun ABK lingkup Ditjen PKTL pada tahun 2019 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini sebagai usulan revisi terhadap Keputusan Menteri LHK No. SK. 415/MENLHK/SETJEN/OTL.2/9/2018. Ditjen PKTL juga telah menyampaikan usulan ABK Tahun 2020-2024 dengan menggunakan nomenklatur jabatan mengacu pada Peraturan MENPAN-RB No.41 Tahun 2018. Sehingga saat ini telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Lingkup KLHK Tahun 2020-2024

Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan dalam rangka membentuk kelembagaan Ditjen PKTL yang dapat mendukung perkembangan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penguatan kelembagaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 diwujudkan dalam bentuk: 1) Penyusunan Proses Bisnis; 2) Evaluasi pelaksanaan penerapan aplikasi e-kinerja lingkup Ditjen PKTL; 3) Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E- Kinerja; dan 4) Optimalisasi Fungsi Organisasi melalui Pembangunan Model Monitoring Efisiensi Fungsi Organisasi.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Tahun 2019 sebesar Rp 477.787.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 460.843.877,- (96,45%). Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan, belanja perjalanan biasa dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2019 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 1 dokumen setiap tahunnya.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam menunjang pemantapan kawasan hutan. Secara umum, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan disusun/ditetapkannya peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan dengan tahapan: pembahasan materi di internal Ditjen PKTL, menghimpun masukan dari daerah, membahas materi lintas

Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pembahasan dengan Instansi terkait dan pakar/tenaga ahli.

Tahun 2019 telah dibahas/disusun/ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/Kum.1/11/2018 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan atas P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman Dalam Kawasan Hutan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/SETDIT/KUM.1/8/2018 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Terpadu Dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Tidak Produktif Untuk Sumber Tanah Obyek Agraria (TORA);
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL/SETDIT/PLA.0/8/2019 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Penerimaan Negar Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Berbasis Online;
10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
11. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.14/PKTL.SETDIT/Keu.0/12/2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/Keu.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;

Untuk memberikan persepsi yang sama dalam implementasi peraturan yang telah ditetapkan, pada Tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dengan peserta yang berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah I-XXII dan Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, pada tahun 2019 juga dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Strategis Pemerintah yaitu:

1. *Expert meeting* terkait pembahasan penanganan pemukiman di dalam kawasan hutan di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 8-9 Maret 2019.
2. FGD Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan di Jakarta tanggal 17 - 18 Agustus 2019
3. Focus Group Discussion penyusunan peraturan perundang-undangan bidang PKTL dan kebijakan strategis pemerintah terkait Penyusunan Jawaban Pemerintah atas Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 77 P/HUM/2019 di Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Yayasan WALHI dan Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan di Bandung tanggal 21 Oktober 2019.
4. Focus Group Discussion Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Bandung tanggal 18 November 2019.
5. Fullboard Focus Group Discussion Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terkait Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Jakarta tanggal 3 Desember 2019.

Kedua tahapan proses tersebut memegang peran penting bagi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja.



Gambar 11. Rapat Forum Group Discussion (FGD) Ditjen PKTL

Hambatan utama dalam pencapaian sasaran kinerja kegiatan ini adalah sulitnya mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil kajian hukum. Untuk meminimalisir hambatan ini, koordinasi dengan unit kerja lain dilakukan secara intensif dengan memberikan batasan waktu tertentu.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan penyusunan draft perundang-undangan bidang PKTL Tahun 2018 sebesar Rp 709.743.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 696.819.258,- (98,18%). Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan, belanja perjalanan dinas biasa dan focus group discussion penyusunan peraturan perundang-undangan. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2019 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 5 draft setiap tahunnya.

Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Ditjen PKTL bertanggung jawab dalam terwujudnya kemantapan prakondisi pengelolaan hutan. Kemantapan prakondisi pengelolaan hutan meliputi kemantapan status dan fungsi kawasan hutan. Dalam pelaksanaan pemantapan prakondisi pengelolaan hutan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan status hukum kawasan hutan.

Penguasaan lahan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak sesuai menimbulkan konflik horizontal, berakar dari permasalahan tersebut perlu langkah tindak lanjut dalam menginventarisasi permasalahan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Permasalahan lain yang terjadi di dalam/sekitar kawasan hutan terkait dengan penataan batas, status hukum dan fungsi kawasan, tumpang tindih kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan serta aktifitas lain yang berdampak hukum.

Dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan yang merupakan **outcomes utama dari sasaran kinerja kegiatan ini**, pada Tahun 2019 dilakukan kegiatan penanganan permasalahan kawasan hutan khususnya di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Dalam proses penanganan permasalahan kawasan hutan telah dilaksanakan kegiatan litigasi dan advokasi terhadap gugatan perdata, gugatan tata usaha negara maupun uji materiil terhadap produk perundang-undangan. Pembahasan-pembahasan dengan pakar hukum dan instansi lain guna menyelesaikan permasalahan dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan juga telah dilakukan. Kegiatan litigasi dan advokasi yang telah dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

1. Litigasi dan Advokasi di Lampung berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung dan Biro Hukum Sekjen KLHK.
2. Litigasi dan Advokasi di Denpasar berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar dan Biro Hukum Sekjen.
3. Litigasi dan Advokasi di Mataram dengan Dinas Kehutanan Mataram dan Biro Hukum Sekjen KLHK.
4. Litigasi dan Advokasi di Kupang dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIV Kupang dan Biro Hukum Sekjen KLHK.

5. Litigasi dan Advokasi di Pontianak dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan III Pontianak dan Biro Hukum Sekjen KLHK.

Kegiatan Litigasi dan Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan pada Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai prosedur yang ada, dan permasalahan kawasan hutan dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hambatan pelaksanaannya adalah kurangnya SDM yang tersedia dibanding dengan jumlah permasalahan yang dihadapi. Ke depannya, penguatan koordinasi dengan instansi terkait akan terus diupayakan dan lebih fokus pada kegiatan.

Gambar 12. Litigasi dan Advokasi Ditjen PKTL



Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 sebesar Rp 560.391.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 557.746.292,-. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan, belanja perjalanan dinas biasa, belanja barang non operasional lainnya dan perjalanan paket meeting dalam kota. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2019 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya, yaitu 1 dokumen setiap tahunnya.

Pengembangan dan Pemantauan Kerja Sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pelaksanaan sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dituangkan dalam rancangan kegiatan didukung penganggaran dalam bentuk APBN serta dari dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana lain yang tidak mengikat ini menjadi sumber dana alternatif yang dapat mengisi kekurangan dana APBN dalam membiayai kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas. Sumber dana alternatif tersebut diperoleh diantaranya melalui kerjasama bilateral/multilateral dengan beberapa negara donor melalui mekanisme pengajuan proposal proyek kepada pihak negara/lembaga/mitra donor. Kegiatan hibah kerjasama luar negeri di Ditjen PKTL pada Tahun 2019 adalah:

1. *Forest Investment Program (FIP) Proyek II “Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project”* yang merupakan kerjasama antara Ditjen PKTL dengan World Bank dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Total hibah untuk FIP Proyek II ini sebesar US\$ 17.350.000. Tujuan proyek adalah mendukung pengembangan dan pembangunan organisasi tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sekaligus menjadi prakondisi keberhasilan pengelolaan hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan peran untuk penanganan perubahan iklim. Kegiatan Proyek FIP II tahun 2019 antara lain :
 - a. Study Banding Pengelolaan Hutan di Perhutani, dan Workshop Penyiapan Persyaratan Pembentukan BLUD bagi UPTD KPH lokasi proyek FIP-II.
 - b. FGD Studi Kelayakan Energi Terbarukan Wood Pellet di KPH Rinbar dan KPH Batulanteh Prov NTB.
 - c. Workshop Perencanaan Pengelolaan Hutan untuk Membangun UPTD Perencanaan Hutan Provinsi Guna Mendukung Perencanaan UPTD KPH.
 - d. Sinergitas Kebijakan KPH Pusat dan Daerah Pasca UU 23 Tahun 2014, Dukungan Operasionalisasi KPH, Pengembangan Bisnis KPH.
 - e. Konsinyasi dan Pembahasan Rencana 3 Bulanan Manajemen SU Proyek II FIP untuk 10 KPH.
 - f. Integrasi Pemantapan Rencana Pengelolaan KPH dan Pemberdayaan masyarakat (Proposal) di 10 KPH.
 - g. Loklatih Pembuatan Fotografi dan Videografi untuk Pelaporan Knowledge Asset.
 - h. FGD Peningkatan Pengelolaan SDA Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan.
 - i. Rapat Koordinasi Progress Pelaksanaan Proyek II FIP.
2. *Environment Support Program Phase III (ESP III)* yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Denmark melalui Danida dengan Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, dengan *Focal Point* yang berada di lintas Kementerian, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas koordinasi dan tanggung jawab seluruh pelaporan kegiatan dan keuangan proyek berada pada Bappenas, sedangkan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) adalah sebagai koordinator program. Jumlah alokasi hibah keseluruhan proyek ESP III adalah *55,25 million Danish Kroner (DKK)*

dengan jangka waktu 5 Tahun (2012-2017) dan diperpanjang sampai Tahun 2018. Perpanjangan ini disebabkan masih tersisanya pekerjaan di Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, namun demikian Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) sebagai koordinator program ESP 3 KLHK tetap bertanggung jawab melaporkan perkembangan proyek.

3. *Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan* merupakan kerjasama yang disponsori oleh *Global Environment Facility* (GEF) dengan *United Nation Development Program* (UNDP) sebagai lembaga pelaksana yang ditunjuk GEF dan Ditjen PKTL sebagai *Implementing Partner* melalui dokumen proyek yang telah ditandatangani pada akhir tahun 2017. Proyek ini akan dilaksanakan dalam periode 7 tahun (November 2017 – November 2024) dengan total hibah sebesar US\$ 9.000.000 yang bersifat hibah langsung terencana barang dan jasa non KPPN. Proyek ini bertujuan untuk menjaga keberadaan hutan di luar kawasan hutan termasuk keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem di Kalimantan. Tahun 2019 telah dilakukan beberapa kegiatan/meeting/workshop/FGD dalam rangka mendukung output project. Kegiatan tersebut antara lain:
 - a. *Interpretation of Forest in APL in Kalimantan from High Resolution Satellite Imagery Inception Workshop*
 - b. Pelatihan Pengolahan Data dan Penginderaan Jauh untuk Pemantauan Hutan di Luar Kawasan Hutan, angkatan I, tahap dasar
 - c. Pelatihan Pengolahan Data dan Penginderaan Jauh untuk Pemantauan Hutan di Luar Kawasan Hutan, angkatan II, tahap dasar
 - d. Pelatihan Pengolahan Data dan Penginderaan Jauh untuk Pemantauan Hutan di Luar Kawasan Hutan, angkatan I, tahap lanjutan
 - e. Pelatihan Pengolahan Data dan Penginderaan Jauh untuk Pemantauan Hutan di Luar Kawasan Hutan, angkatan II, tahap lanjutan
 - f. Bimbingan teknis pengolahan data hutan di Luar Kawasan Hutan
 - g. Lomba Infografis dalam rangka Hari Lahan Basah Sedunia
 - h. Studi Banding Mekanisme Insentif Desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat ke Desa Mandiri di Brebes, Purwokerto dan Yogyakarta
 - i. Kick Off Kegiatan "*Regulation Review or HCVF Management Establishment at Released Forest and APL in Developing Technology Procedure to Rehabilitate Degraded Forest*
 - j. *Project Board Meeting* ke 3
 - k. Pengembangan Web-Portal dalam rangka *Knowledge Management*
 - l. Kajian Peraturan terkait Pelepasan Kawasan Hutan
 - m. Pengembangan Sistem terkait Pelepasan Kawasan Hutan
 - n. Kajian Pakar untuk Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
 - o. Kajian Pakar terkait sawit dalam kawasan hutan
 - p. Kajian Pakar terkait Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang PIPPIB
 - q. Penyusunan Roadmap 2020-2024 di Kabupaten Sintang, Ketapang, Kutai Timur dan Kotawaringin Barat



Gambar 13. UN Climate Change Conference (COP-25 UNFCCC) di Madrid, Spanyol

Hubungan kemitraan antara Indonesia dengan mitra internasional dan domestic diharapkan bersifat *mutual respect*, *mutual benefit*, *mutual understanding* dan dapat mendukung tugas fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk dapat mewujudkannya, dilakukan pengembangan dan pemantauan kerja sama teknik serta asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama.

Pengembangan kerjasama dilakukan melalui fasilitasi penyiapan materi Delegasi RI dalam sidang-sidang internasional serta pertemuan bilateral dan multilateral. Fasilitasi ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber informasi yang valid, terutama dari pihak yang menjalin kerjasama untuk diolah dan dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk informasi aktual mengenai kerjasama, saran dan pendapat yang positif terhadap pihak-pihak yang menjalin kerjasama dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Beberapa kegiatan pengembangan kerjasama bilateral dan multilateral yang diikuti oleh Ditjen PKTL Tahun 2019 baik sebagai DELRI ataupun undangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka sebagai DELRI pada *The 15th ASEAN Working Group on Forest Management (AWGFM-15)* di Selangor, Malaysia tanggal 23-27 April 2019.
- b. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka menghadiri pertemuan *G7 Environment Minister Meeting* di Metz, Perancis tanggal 3-8 Mei 2019.
- c. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka menghadiri konferensi "*People and Climate-Solidarity and Just Transition*" di Warsawa, Polandia tanggal 1-5 Juli 2019.
- d. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka menghadiri *The Equator Prize Award Ceremonies* di New York City tanggal 21-28 September 2019.
- e. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka menghadiri UN Climate Change Conference (COP-25 UNFCCC) di Madrid, Spanyol tanggal 4-11 Desember 2019.
- f. Pengembangan Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka *Study Visit to Share Knowledge and Experience on non State Forest Management in Peatland* di Malaysia tanggal 26-29 Desember 2019.

Pemantauan kerjasama dilakukan terhadap kerjasama yang sedang dan atau telah dilakukan. Pemantauan kerjasama dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan kehutanan, khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kegiatan pengembangan dan pemantauan kerjasama ini diharapkan berdampak terhadap percepatan pencapaian sasaran pembangunan kehutanan, khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2019, yaitu :

1. Asistensi terkait Penyelesaian Pengakhiran Proyek *Environmental Support Programme Phase 3 (ESP-3)*, dengan asistensi ini diharapkan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kehutanan Wilayah dan Sektor sebagai *Executing Agency* proyek ESP3 dapat menyelesaikan pengakhiran hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Asistensi terkait Sosialisasi Kebijakan dan Prioritas GEF 7 dalam rangka Penyusunan Proposal GEF Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kegiatan asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama hibah merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat perlunya peningkatan persamaan persepsi terhadap pengelolaan kerjasama terutama para pelaksana *project* yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Kegiatan asistensi ini perlu dilakukan secara berkala sebagai wadah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.

Apabila dibandingkan dengan target output dalam renstra, realisasi sampai dengan tahun 2019 relatif rendah. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang pada awalnya direncanakan di dalam Renstra, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Selain itu kegiatan pengembangan dan pemantauan kerjasama bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan di dalamnya terdapat 2 (dua) output kegiatan yaitu kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan dan pemantauan kerjasama teknik bidang PKTL Tahun 2019 sebesar Rp 818.797.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 773.224.941,-. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Selain itu perlu dilakukan penguatan pelaksanaan kegiatan muai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi sehingga target kegiatan tercapai tepat waktu.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kegiatan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang PKTL Tahun 2019 dilaksanakan lebih baik dengan mengacu pada prosedur, tata waktu dan peraturan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait menjadi salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan. Outcomes yang dihasilkan antara lain:

1. Pengelolaan kerjasama/hibah dapat terlaksana dengan baik dan laporan kegiatan hibah/kerjasama dapat terdokumentasi dengan baik.
2. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menjadi narasumber dan deliri pada sidang-sidang internasional.

Pengelolaan Keuangan

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PKTL adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam hal ini Setditjen PKTL.

Penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Penggunaan Anggaran Negara dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang direkonsiliasikan dengan KPPN melalui upload data ke sistem E-Rekon&LK, sehingga dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Pendapatan Negara dan Hibah.

Gambar 14 Rapat Penyusunan Laporan Keuangan



Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2019 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.107.094.547.077,- atau mencapai 180,94% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1.164.514.574.000,-. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 422.594.107.291,- atau mencapai 93,64% dari alokasi anggaran sebesar Rp 451.314.101.000,-.(sumber: OMSPAN Per 31 Desember 2019, data diunduh pada 16 Januari 2020).

Nilai Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 800.415.918.369,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 229.314.247.232,-, Aset Tetap (netto) sebesar Rp 556.537.456.950,-, Piutang jangka panjang (Rp10.857.000,-) dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 14.575.071.187,-, sedangkan Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.761.306.534,- dan Rp 798.654.611.835,-. (sumber: E-REKON Per 31 Desember 2019 data diunduh pada 16 Januari 2020). Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2019 menggambarkan telah terjadi surplus-LO sebesar Rp 1.144.836.332.264,-, sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 798.654.611.835,-. (sumber: E-REKON Per 31 Desember 2019 data diunduh pada 16 Januari 2020)

Dalam rangka mengkoordinasikan Laporan SAI dari masing-masing Satker (Pusat dan Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah I-XXII) serta untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ada maka pada Tahun 2019 dilaksanakan bimbingan dan pembinaan SAI ke seluruh Satker terkait serta Penyusunan Laporan Keuangan yang diselenggarakan setiap Semester dengan melibatkan seluruh Satker lingkup Ditjen PKTL.

Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan juga melakukan Rapat Koordinasi dan sosialisasi peraturan untuk meningkatkan wawasan di bidang peraturan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Upaya perbaikan yang akan terus diupayakan kedepannya dalam bentuk sosialisasi perbendaharaan kepada para pelaksana perbendaharaan sehingga terwujud pengelolaan anggaran yang akuntabel. Dalam pengajuan pertanggungjawaban belanja diterbitkan Nota Hasil Verifikasi (NHV) untuk meminimalisir kesalahan penggunaan kode kegiatan/akun.

Tantangan ke depan, satuan kerja Kantor Pusat Ditjen Planologi Dan Tata Lingkungan akan mengalami penggabungan dari 6 (enam) satuan kerja menjadi 1 (satu) satuan kerja, Setditjen PKTL akan menyiapkan proses likuidasi 6 (enam) satuan kerja dan menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan satuan kerja yang baru di Tahun 2020.

Gambar 15. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan



Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.107.094.547.077,- atau mencapai 180,94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.164.514.574.000,00. Pendapatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagian besar terdiri dari Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan.

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 36,95 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah setoran PNPB PKH

dan bertambahnya wajib bayar (pemegang IPPKH) dari Penggunaan Kawasan Hutan dari pembayaran PNB-PKH tahun berjalan, PNB PKH terutang tahun sebelumnya, kekurangan pembayaran hasil Berita Acara Verifikasi dan Pembayaran denda untuk piutang 2019 dan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja kegiatan ini adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tingkat Eselon I, serta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan. Outcome penting atas tercapainya output sasaran kinerja kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Eselon I dan II Tahunan dengan andal dan tepat waktu, Tersusunnya Laporan Keuangan Eselon I dan II Semesteran dengan andal dan tepat waktu, Terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Dalam melaksanakan pencairan keuangan dan pelaporannya sub bagian administrasi keuangan menggunakan Aplikasi SAS, Silabi, SAIBA, E Rekon & LK yang kedepan akan *di launching* Aplikasi penggantinya yaitu SAKTI yang akan mengakomodir seluruh aplikasi yang ada pada transaksi keuangan. Sub bagian administrasi keuangan menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung Aplikasi SAKTI.

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada Ditjen PKTL, efektifitas pengawasan perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditor sampai dengan selesai.

Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.

Sebagai upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian temuan auditor, pada Tahun 2019 Setditjen PKTL melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK, BPKP, ITJEN, WASMAS dan Kasus Kerugian Negara di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK RI Lingkup Ditjen PKTL sampai dengan Tahun 2019 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Ditjen PKTL

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan	Rekomendasi	Status Rekomendasi	
					TUNTAS	BLM TUNTAS
BPK RI						
1	2012	2	10	15	10	5
2	2013	4	24	29	22	7
3	2014	1	3	5	1	4

4	2015	1	9	15	4	11
5	2016	3	16	30	7	23
6	2017	4	29	51	10	41
7	2018	1	8	15	1	14
8	2019	4	13	23	0	23
Inspektorat Jenderal						
1	2012	1	7	12	11	1
2	2013	3	17	31	30	1
3	2014	3	16	28	25	3
4	2015	7	38	82	80	2
5	2016	9	49	96	89	7
6	2017	11	62	129	115	14
7	2018	13	56	147	108	39
8	2019	16	74	181	95	86

Keterangan: Hasil uji nilai s.d.November 2019.

Pelaksanaan rapat LHP dilaksanakan dengan rapat kantor dan di luar jam kerja sebagai langkah efisiensi penggunaan anggaran. Outcome utama kegiatan ini adalah terselesaikannya rekomendasi. Kondisi ini dapat dicapai ketika Auditan segera menindaklanjuti rekomendasi dari auditor. Keberhasilan dalam mengurangi Temuan atas pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal akan diupayakan ke depannya dengan sosialisasi peraturan pelaksanaan perbendaharaan.

Kendala terbesar yang dihadapi saat menindaklanjuti rekomendasi adalah adanya perbedaan persepsi antara auditor dengan auditan terhadap suatu permasalahan, untuk meminimalkan kendala tersebut, dilakukan koordinasi intensif dengan melibatkan Direktorat pada setiap pembahasan tindak lanjut.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Ditjen PKTL Tahun 2019 sebesar Rp 758.320.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 727.381.952,-. sebagai langkah untuk efisiensi penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan dan Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan dengan satuan kerja pusat dan daerah dilakukan dengan menggunakan fasilitas ruang rapat di dalam kantor, tanpa mengurangi output yang dihasilkan jika dibandingkan dengan pelaksanaan di luar kantor atau di hotel.

Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN merupakan aset negara yang memerlukan perencanaan, pengelolaan dan perawatan yang baik. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum yang di dalam pelaksanaannya mensinergikan antara fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan akan memberikan kontribusi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

Sebagai satuan kerja yang bertugas melakukan pengelolaan BMN dan memberikan pembinaan petugas SIMAK BMN seluruh satker lingkup Ditjen PKTL, pada tahun 2019 Setditjen PKTL telah melaksanakan penyusunan laporan barang milik negara (SIMAK-

BMN) lingkup Ditjen PKTL, pembinaan administrasi pengelolaan perlengkapan dan penyusunan rencana kebutuhan BMN Lingkup Ditjen PKTL.

Outcomes dari pembinaan pengelolaan perlengkapan adalah tersosialisasikannya prosedur dan langkah-langkah serta peraturan terbaru terkait pengelolaan Barang Milik Negara tingkat satker BPKH di seluruh Indonesia, diantaranya meliputi tentang Penetapan Status BMN, hibah BMN, lelang dan penjualan BMN dalam rangka penghapusan. Dalam kegiatan pengelolaan BMN ini, Setditjen PKTL sebagai Pembina satker dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dapat berpotensi memperlambat proses pengelolaan BMN tingkat satker sehingga dapat dicarikan solusinya agar proses penghapusan, hibah maupun penetapan status dapat lebih lancar dan tidak terkendala di kemudian hari.

Outcomes dari penyusunan Laporan BMN adalah tersusunnya laporan Barang Milik Negara tingkat satker maupun tingkat Eselon I tepat waktu. Laporan Barang Milik Negara merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntansi Instansi yang menyumbang sebagian besar dari nilai neraca, sehingga dengan tersusunnya laporan BMN dengan tepat waktu menunjang tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel.

Outcomes dari penyusunan rencana kebutuhan BMN adalah tersusunnya daftar pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik negara yang sesuai dengan peraturan dan terencana sesuai dengan kebutuhan instansi dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.

Ditjen PKTL merupakan Unit Eselon I yang berkewajiban menghimpun dan mengungkapkan pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas mutasi BMN secara berjenjang, baik mutasi tambah maupun mutasi kurang yang terjadi pada masing-masing satker di lingkup Ditjen PKTL. Penyusunan laporan pertanggungjawaban BMN Tahun 2018 dilakukan dalam rangka mendukung Laporan BMN di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Tantangan yang dihadapi Setditjen PKTL saat ini terkait SIMAK-BMN adalah kesulitan petugas dalam mengontrol perpindahan fisik BMN, akibat kuantitas BMN yang banyak dan tersebar di beberapa lokasi kantor. Ke depannya, Setditjen PKTL dibantu dengan satker pusat lingkup PKTL akan mengupayakan efektifitas Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan penanggungjawab masing-masing ruangan serta membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) atas BMN pengadaan baru dari PPK ke pemegang BMN yang bersangkutan.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan SIMAK BMN Ditjen PKTL Tahun 2019 sebesar Rp 581.654.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 517.419.512,- (88,9%). Rendahnya serapan anggaran pada sasaran kinerja ini disebabkan oleh: 1) biaya pengangkutan BMN rusak hanya dapat dilaksanakan 46% dari pagu karena sesuai realitas BMN yang rusak, 2) lelang BMN hanya dapat dilaksanakan 17% dari pagu berupa lelang kendaraan Dinas dan lelang peralatan kantor karena hanya satu kegiatan lelang (lelang kendaraan dinas) yang diumumkan di koran.

Ditjen PKTL membutuhkan dukungan administrasi maupun dukungan teknis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Lingkup Ditjen PKTL. Dukungan administrasi perkantoran di antaranya berupa kegiatan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan sangat dibutuhkan dalam melayani dan membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari organisasi. Secara rinci, kegiatan ketatausahaan meliputi beberapa aktivitas berupa: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan dukungan administrasi atas tugas-tugas pada Lingkup Ditjen PKTL, maka difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan terkait Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker. Dengan terfasilitasinya kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas di Lingkup Ditjen PKTL.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diantaranya adalah masih sering terjadi gangguan pada jaringan Sistem Informasi Kearsipan dan masih kurangnya SDM yang menangani kearsipan serta terbatasnya ruang penyimpanan naskah dinas/arsip. Untuk itu selalu dilaksanakan koordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola SIK dan bekerja sama dengan Unit Pusat Kearsipan untuk penanganan arsip in aktif.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sistem digital penatausahaan naskah dinas/persuratan, pengelolaan persuratan di Sekretariat Ditjen PKTL pada Tahun 2019 sesuai aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK) adalah sebagai berikut: surat masuk ke Direktur Jenderal PKTL sebanyak 12.238 berkas surat, dan surat keluar dari Direktur Jenderal PKTL sebanyak 3.003 berkas surat. Sedangkan surat yang masuk ke Sekretaris Ditjen PKTL selama Tahun 2019 sebanyak 3.192 berkas surat dan surat keluar sebanyak 6.790 berkas surat. Secara rinci rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2019 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2019

No	Jenis Surat	Dirjen	Sekditjen
1	Surat Masuk	12.348	3,192
2	Surat Keluar	3.003	6.790
-	Berita Acara SerahTerimaBarang	13	109
-	Berita Acara SerahTerimaJabatan	5	74
-	BeritaTelepon	-	7
-	Faksimile	-	9
-	Instruksi	1	18
-	Keputusan	312	187
-	Laporan	-	8
-	Memorandum	6	9
-	Nota Dinas	186	830
-	Peraturan	12	9
-	Peraturan Bersama	1	9
-	ProsedurTetap	-	27
-	Sertifikat	-	9
-	StandarOperasional/Prosedur	-	14

- Surat Dinas	2.028	2.126
- Surat Edaran	4	29
- Surat Ijin	3	244
- Surat Keterangan	6	161
- Surat Kuasa	2	16
- Surat Panggilan	-	20
- Surat Pengantar	-	19
- Surat Perintah	6	1.122
- Surat Perjanjian Kerjasama	-	9
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	6	102
- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan	5	70
- Surat Pernyataan Pelantikan	5	70
- Surat Tugas	294	660
- Surat Undangan	158	822
- Telaahan Staf		1
- Surat Rahasia	4	
Jumlah 1 dan 2	15.351	8.147

Kegiatan pengelolaan dan penataan arsip yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 yaitu :

1. Fumigasi arsip yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli s/d 2 Agustus 2019 bertempat di Gedung Pusat Kearsipan Cimanggis melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana, yaitu PT. Balqis Perkasa Indonesia. Arsip yang difumigasi meliputi arsip in aktif dari Bagian Keuangan dan Umum dan Bagian Program Evaluasi.
2. Digitalisasi arsip/dokumen yaitu kegiatan alih media arsip/scan arsip sebagai upaya penyelamatan dokumen . Terdapat 5.008 lembar dokumen yang discan dari rencana 5.000 lembar dokumen. Arsip tersebut selanjutnya disimpan dalam 6 keping CD.



Gambar 16. Fumigasi Arsip

Kegiatan rekonstruksi arsip dinamis pada Ditjen PKTL telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2015, pada tahun 2019 kembali dilaksanakan. Dikarenakan kurangnya tenaga arsiparis pada Setditjen PKTL, maka dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan tenaga arsiparis pada Unit Pusat Kearsipan untuk melaksanakan rekonstruksi arsip ini. Untuk tahun 2019 telah direkonstruksi sebanyak 3.040 berkas arsipin aktif yang tersusun dalam 115 boks arsip dan selanjutnya telah diserahkan ke Unit Pusat Kearsipan Cimanggis Depok untuk penyimpanan.

Kegiatan fasilitasi penatausahaan pimpinan dalam rangka kegiatan bidang keplanologian dilaksanakan berupa memberikan pelayanan prima terhadap pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar tercapai kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker, serta Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan Tahun 2019 sebesar Rp 1.552.824.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.544.610.084,- (99,47%).

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan yang dilaksanakan pada awal tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp 460.574.000 antara lain berupa pembelian laptop, komputer, printer, proyektor,

scanner, AC split, mesin absensi, hard disk SSD, exhaust fan, dan kendaraan roda 4. Seluruh belanja modal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak dijumpai kendala yang berarti dengan realisasi anggaran sebesar Rp 440.694.650,-.

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran terdiri dari dua kelompok kegiatan, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Setditjen PKTL dilakukan untuk pegawai Satker Pusat lingkup Ditjen PKTL dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2019 terdapat kelebihan pengalokasian belanja pegawai pada DIPA Setditjen PKTL sebesar Rp 839.010.871,-. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 46.722.245.000,-, hingga akhir tahun anggaran dapat terserap sebesar Rp 45.883.234.129,- (98,20%). Sisa belanja pegawai ini disebabkan oleh adanya potongan uang makan dan tunjangan kinerja. Ke depannya penalokasian belanja pegawai akan dilakukan lebih cermat.

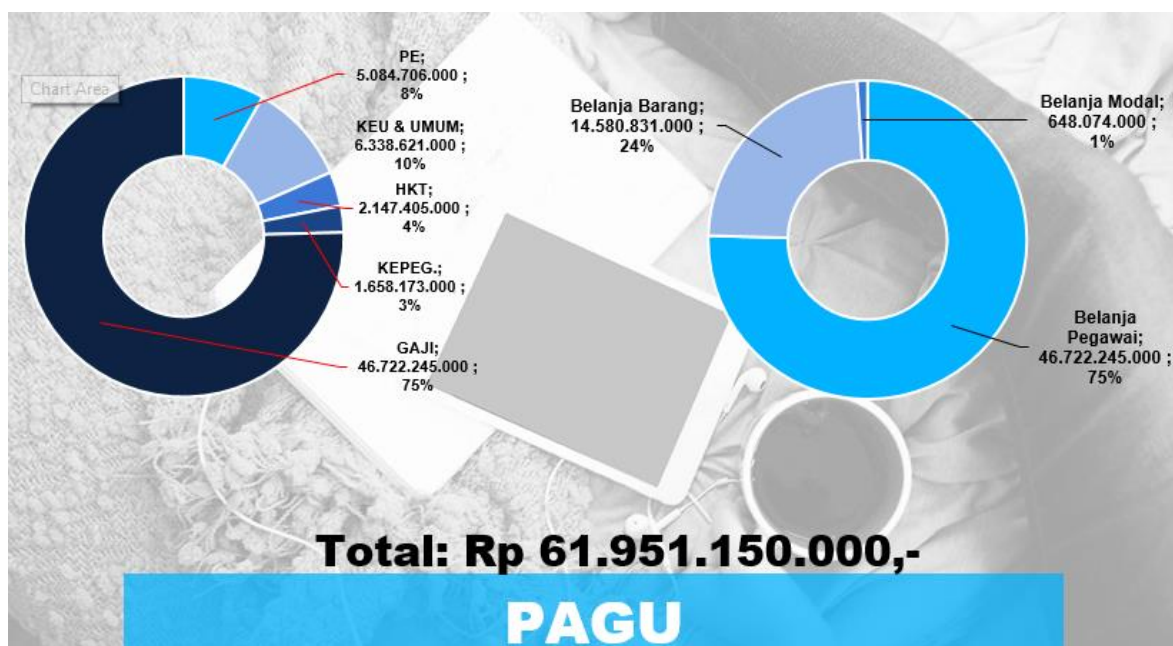
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan sepanjang Tahun 2019 bersifat rutin, antara lain adalah pengadaan pakaian kerja pesuruh/supir/satpam, perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor (barang cetakan, alat RT, dan langganan majalah), perawatan kendaraan roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, operasional pelaksanaan satker, operasional pimpinan dan perkantoran, serta operasional unit layanan pengadaan (ULP).

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Tahun 2019 sebesar Rp 3.342.323.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.257.967.788,- (97,48%). Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin dari tahun ke tahun, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Setditjen PKTL Tahun 2019 adalah sebesar Rp 61.951.150.000,- dengan capaian sebesar Rp 60.702.776.268,- atau 97,98%. Alokasi anggaran Tahun 2019 lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2018. Alokasi anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp 68.605.187.000,- dengan capaian sebesar Rp 61.391.499.761,- atau 89,49%. Kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen PKTL Tahun 2019 meningkat dari aspek persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan Tahun 2018.

Gambar 17. Komposisi Pagu Setditjen PKTL



Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2019 untuk setiap sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2019

Output / Sasaran	Pagu	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	11.426.008.000	11.120.879.701	97,33
Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	1.859.754.000	1.831.653.963	98,49
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	810.185.000	796.556.826	98,32
Pengelolaan data dan informasi	2.132.767.000	2.060.496.710	96,61
Pengelolaan keuangan	758.320.000	748.381.952	98,69
Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	2.088.931.000	2.043.974.135	97,85
Pengelolaan kepegawaian	1.163.786.000	1.119.762.205	96,22
Pelayanan umum dan perlengkapan	2.134.478.000	2.059.210.033	96,47
Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	477.787.000	460.843.877	96,45

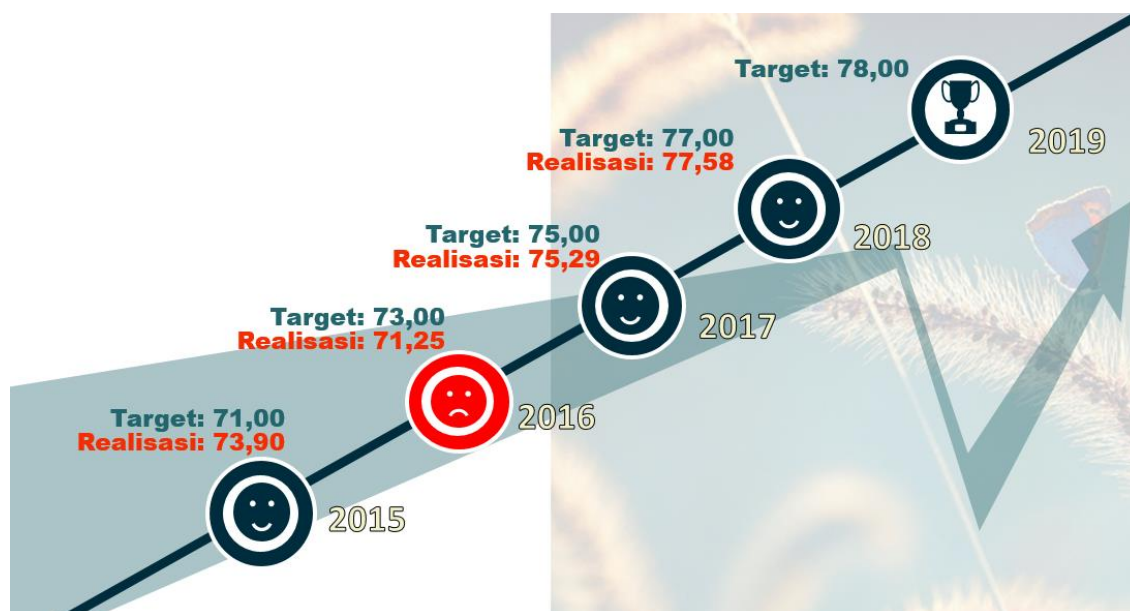
Output / Sasaran	Pagu	Realisasi	%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	460.574.000	440.694.650	95,68
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	194.074.000	175.195.050	90,27
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	266.500.000	265.499.600	99,62
Layanan Perkantoran [Base Line]	50.064.568.000	49.141.201.917	98,16
Gaji dan Tunjangan	46.722.245.000	45.883.234.129	98,20
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.342.323.000	3.257.967.788	97,48
Total	61.951.150.000	60.702.776.268	97,98

BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2019 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 78 poin**. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2019 dilakukan pada Tahun 2020, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Tahun 2019, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **77,58 dengan kategori BB (sangat baik)**. Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 75,29. Realisasi hasil penilaian Tahun 2018 ini berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar 77 point. Gambaran target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada gambar 11.

Gambar 18. Perkembangan nilai implementasi SAKIP Ditjen PKTL



Sebagai unit organisasi yang mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen, Setditjen PKTL telah mengkoordinasikan untuk secara bersama menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2018. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Ditjen PKTL telah menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan memantaunya secara berkala dalam rangka pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- b. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja pada Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan mencermati hasil penilaian setiap kriteria.
- c. Informasi kinerja diupayakan untuk dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan kinerja dengan berkoordinasi pada bidang/bagian maupun satker dan melalui pemantauan yang lebih cermat.

Apabila melihat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) khusus pada satker Setditjen PKTL, nilai yang didapatkan sebesar **82,82 dengan kategori A (memuaskan)**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterima, tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KLHK untuk ditindaklanjuti. Kendati demikian, berbagai rekomendasi umum yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK untuk satker lain di Lingkup Ditjen PKTL tetap menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP Eselon I sebesar 79 yang menjadi target di tahun 2020 dapat tercapai.

BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Setditjen PKTL untuk mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Setditjen PKTL sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sama dengan Tahun 2018 yaitu sebesar 100% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,03.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Setditjen PKTL sebagai salah satu Eselon II pada Ditjen PKTL yang menyelenggarakan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan” telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Setditjen PKTL, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Ditjen PKTL kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2019. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setditjen PKTL yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Triyono Saputro, M.MSI.
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Evaluasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2019

Pihak Kedua,

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Triyono Saputro, M.MSI.
NIP. 19660619 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen Rencana Program dan Rencana dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Dokumen
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan pemantauan, monev dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Dokumen
Pengelolaan Data dan Informasi	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Terselenggaranya Kehumasan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4 Dokumen

Kegiatan Bagian Program dan Evaluasi
 Jumlah Anggaran Rp. 4.395.552.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Jakarta, Agustus 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
 NIP. 19600411 198703 1 001

Kepala Bagian Program dan
 Evaluasi,



Ir. Triyono Saputro, M.M.SI.
 NIP. 19660619 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Sylvia Febriyanti, S.E, M.M.

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2019

Pihak Kedua,

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

Pihak Pertama,

Ari Sylvia Febriyanti, S.E, M.M.
NIP. 19760216 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)	Tersedianya Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)	1 Layanan

Kegiatan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,
 Jumlah Anggaran Rp. 1.658.173.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Jakarta, Agustus 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
 NIP. 19600411 198703 1 001

Kepala Bagian Kepegawaian,
 Organisasi dan Tata Laksana,



Ari Sylvia Febriyanti, S.E, M.M.
 NIP. 19760216 199903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endi Sugandi, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2019

Pihak Kedua,

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

Pihak Pertama,

Endi Sugandi, S.H., M.H.
NIP. 19651123 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal :		3 Dokumen
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik)	Tersedianya Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik)	1 Layanan

Kegiatan Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,
 Jumlah Anggaran Rp. 2.147.405.000,- (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*)

Jakarta, Agustus 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
 NIP. 19600411 198703 1 001

Kepala Bagian Hukum dan
 Kerjasama Teknik,



Endi Sugandi, S.H., M.H.
 NIP. 19651123 199803 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. R. Noer Hidayah Poernamasari
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Umum
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

Pihak Pertama,

Dra. R. Noer Hidayah Poernamasari
NIP. 19640803 199103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Pengelolaan Keuangan :	Laporan Laporan Keuangan	3 Dokumen
Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Laporan Pelayanan dan Perlengkapan	2 Dokumen
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Bagian Keuangan dan Umum)	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Bagian Keuangan dan Umum)	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan Bagian Umum dan Keuangan.

Jumlah Anggaran Rp. 52.288.658.000,- (*Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

Jakarta, 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

Kepala Bagian Keuangan dan
Umum



Dra. R. Noer Hidayah Poernamasari
NIP. 19640803 199103 2 001